

**INOVASI NILAI DAN FUNGSI KOMUNIKASI
PARTAI POLITIK BAGI PENGUATAN
*CIVIC LITERACY***

**Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik
Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Bandung, 24 November 2010**

Oleh KARIM SURYADI



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2010**

Inovasi Nilai dan Fungsi Komunikasi Partai Politik bagi Penguatan *Civic Literacy*

Oleh Karim Suryadi

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat,

Bapak Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat,

Bapak Rektor dan Pembantu Rektor,

Bapak Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik,

Ibu/Bapak Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua LPPM

Para Pembantu Dekan, dan Asisten Direktur

Para Direktur Direktorat, Direktur Kampus Daerah,

Para Ketua Jurusan, Prodi, dan Sekretaris Jurusan,

Para Pejabat Sipil dan Militer,

Para dosen dan karyawan,

Para mahasiswa yang saya cintai, serta

Hadirin undangan yang dimuliakan Allah Swt.

Pertama-tama, perkenankan saya mengajak hadirin memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri upacara yang terhormat ini. Syukur alhamdulillah, atas anugrah iman dan setetes ilmu yang dikaruniakan Allah Swt. hingga mengantarkan saya pada upacara

pengukuhan jabatan guru besar ini. Saya menyadari, jabatan guru besar yang saya emban merupakan amanah guna meningkatkan kualitas amal ilmiah dan ilmu amaliyah.

Hadirin yang saya muliakan,
Kini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan berjudul Inovasi Nilai dan Fungsi Komunikasi Partai Politik Bagi Penguatan *Civic Literacy*.

Hadirin yang saya hormati,
Peningkatan *civic literacy*, yakni pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik dan kenegaraan menjadi keniscayaan seiring dengan perubahan politik yang menuntut warga bertindak secara otonom. Perubahan struktur politik Indonesia berlangsung dengan amat cepat. Eforia demokratisasi menjalar hampir ke seluruh elemen masyarakat. Partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan bermunculan seperti jamur di musim hujan. Namun kegagalan partai politik menghadirkan perubahan nyata yang diharapkan masyarakat bukan hanya memicu apatisme, tetapi juga mendorong munculnya sinisme politik.

Hubungan antara partai politik dan masyarakat hambar. Kebersamaan di dalam makna antara politisi dan konstituen sulit diwujudkan. Ini terjadi karena apa

yang dipikirkan partai politik tidak simetris dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan publik.

Melemahnya ikatan emosional terhadap partai politik bukan fenomena khas Indonesia. Diamond & Gunther (2001) mencatat penurunan *partisanship* (ikatan emosional warga terhadap partai politik) di negara-negara penganut demokrasi modern dalam 25 tahun terakhir. Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab penurunan tersebut adalah kinerja partai politik yang kurang memuaskan, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap politisi dan lembaga politik, serta dampak keterlibatan warga di dalam politik (*political efficacy*) yang rendah.

Fenomena seperti digambarkan di atas menarik dikaji karena dua alasan berikut. Pertama, peningkatan arus informasi politik selalu dihubung-hubungkan dengan pendidikan politik. Namun meningkatnya intensitas penyebaran pesan politik tidak diikuti peningkatan kemelekwacanaan warga tentang masalah-masalah politik dan kenegaraan. Orientasi publik tentang politik masih parokhialistik. Citra publik tentang partai politik dan politisi pun kurang baik.

Kedua, meskipun struktur politik telah berubah secara drastis, pola respon warga tidak mengalami mutasi yang berarti. Mobilisasi masih dominan dibanding partisipasi politik. Hubungan warga dengan partai politik tidak dilandasi pemahaman tentang platform partai (*political platforms*) melainkan didasarkan

atas transformasi loyalitas primordial ke dalam wilayah politik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perubahan struktur politik belum diikuti perubahan kultur politik sehingga transformasi politik di Indonesia berlangsung secara fragmentaris.

Fenomena di atas mencuatkan beberapa pertanyaan berikut. Mengapa intensitas penyebaran pesan politik tidak diikuti peningkatan *civic literacy* sebagai elemen penting dalam membangun warga negara yang otonom. Mengapa komunikasi yang digalang aktivis partai gagal membangun *partisanship* dan membentuk citra publik tentang politisi dan partai politik itu sendiri. Bagaimana tatanan komunikasi politik harus dibangun sehingga mempercepat transformasi budaya politik demokratis di Indonesia.

Ketiga pertanyaan komunikasi politik tersebut penting dianalisis guna mengurai hubungan yang ganjil antara warga negara, partai politik, dan sistem politik. Komunikasi politik dipercaya mampu memperbaiki hubungan tersebut karena bila sistem politik dipandang sebagai tubuh, maka komunikasi politik adalah cairan di dalamnya. Kesehatan dan keseimbangan tubuh bergantung kepada sirkulasi cairan tubuh dan zat-zat (materi) yang dikandungnya.

Apabila materi yang dibawa air didominasi testosteron maka karakteristik orang tersebut akan maskulin; apabila yang dibawa air mengandung unsur estrogen yang dominan maka orang itu akan menjadi

feminim. Demikian pula bila yang dibawa tiroksin, kekurangan zat ini akan menyebabkan keterlambatan pertumbuhan. Bila yang dibawa cairan tubuh parathormon, maka kekurangan unsur ini dapat menyebabkan kretinisme, yakni pertumbuhan fisik yang tidak normal dan keterlambatan perkembangan mental.

Seperti halnya tubuh kekurangan air, sistem politik akan mengalami entropi (gangguan) apabila kurang mendapatkan pasokan informasi yang memadai. Keseimbangan sistem politik akan terganggu bila arus pesan tidak lancar, atau bila hanya disuplai informasi yang mengandung polutan, atau pesan yang menyesatkan. Karena itu, layaknya tubuh, sistem politik membutuhkan pesan yang sehat lagi menyehatkan.

Mencari Spiritualitas Komunikasi Politik: Sebuah Retrospeksi

Hadirin yang saya hormati,

Saya menaruh perhatian terhadap komunikasi politik sejak belajar tulis-menulis di media massa (sebagai mahasiswa semester dua, awal 1990). Minat ini terus tumbuh, dan mendorong saya menulis skripsi sarjana bernuansa komunikasi politik, dengan judul *Dampak Siaran "Dunia dalam Berita" Terhadap Wawasan Globalisasi Siswa SMA di Kota Bandung* (1992). Kala itu, berita tentang negara dan pemerintah Indonesia menjadi fenomena yang serba hadir dan mudah didapat di mana-mana. Media massa pada zaman Orde Baru menjadi

ideological-state apparatus. Media menjadi instrumen penting "politik penyeragaman" Orde Baru. Dalam konteks ini, siaran *Dunia dalam Berita* yang ditayangkan TVRI menjadi jendela bagi warga yang ingin melihat dunia lain di luar sana.

Kehebatan media dalam membentuk tanggapan kognitif khalayak tentang mekanisme sistem politik terkonfirmasi dalam penelitian tesis saya (1999). Kognisi politik khalayak turut dibentuk pemberitaan media. Mereka termotivasi untuk mencari seseorang yang dianggap ahli dalam hal politik meski tidak harus setuju secara politis dengan orang tersebut. Namun penelitian saya pun menegaskan keterbatasan media dalam mengubah keyakinan politik.

Tumbangnya Orde Baru disambut kehadiran puluhan partai dengan asas yang berbeda. Padahal semasa Orde Baru masyarakat Indonesia hanya mengenal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Politik Orde Baru pun kukuh di atas landasan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fenomena di atas menggugah minat saya untuk mengkaji lebih jauh proses transformasi ideologis di kalangan partai-partai dan peran komunikasi politik kiai sebagai *significant others*. Komunikasi politik kiai menarik dikaji karena sejak tumbangnya Orde Baru agama secara

terang-terangan dibawa ke ranah politik. Banyak kiai tidak malu-malu bermain di wilayah politik.

Penelitian disertasi saya tentang *Kedudukan Platform, Komunikasi Politik Kiai, dan Identifikasi Kepartaian* (dari tahun 2004-2006), bukan saja berhasil memotret wajah politik kepartaian Indonesia yang centang perenang, tetapi juga menemukan transformasi nilai-nilai komunikasi politik khas Indonesia. Nilai-nilai inilah yang saya elaborasi lebih jauh dalam penelitian tentang *Islam Simbolik dan Transformasi Loyalitas Primordial* (2007), serta *Partai Politik, Civic Literacy, dan Civil Society* (2008). Bagaimana peran partai politik dalam menghela lokomotif perubahan dan hubungannya dengan aktor politik lain mendapat potret pembandingan ketika saya berkesempatan mengamati peran partai dan organisasi sosial di Amerika (2007) dan Jepang (2008).

Serangkaian penelitian yang telah dilakukan menemukan pesan yang jelas bahwa keterlibatan warga dalam urusan politik tumbuh dari kesadaran untuk mengatasi masalah sosial secara sukarela (*volunteerism*). Kesadaran dan jiwa *volunteerism* lebih lanjut diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan dan pembelajaran sosial (*community service and learning*), yang memberi kesempatan kepada warga untuk belajar banyak hal dalam mengatasi persoalan publik. Perkembangannya adalah menegaskan makna politis dari kerja sama antarwarga dan pengalaman keterlibatan dalam

mengatasi masalah sosial melalui pemilihan umum dan peristiwa politik lainnya.

Jelaslah metamorfosis seorang aktivis politik dimulai dari tumbuhnya *volunteerism*, dimatangkan dalam kerja dan belajar sosial, lalu ditegaskan melalui keterlibatan dalam peristiwa-peristiwa politik. Karena itu, politisi yang matang tidak muncul tiba-tiba, bukan muncul karena "jatah yang terjatuh dari langit" (karena silsilah dan hubungan darah). Pengalaman keterlibatan dalam mengatasi masalah-masalah sosial adalah sebuah "deposit" yang harus dibayar ketika seseorang bersaing merebut jabatan publik.

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam satu dasa warsa terakhir, partai politik mendominasi wacana dan praksis politik Indonesia. Hampir tidak ada urusan publik yang tidak melibatkan partai politik. Namun kemenonjolan peran partai politik belum diikuti peningkatan kompetensi kadernya, sehingga kehadiran partai politik sering tidak fungsional. Fungsi partai politik dalam menjaga saluran komunikasi agar tetap terbuka kerap gagal, sehingga kemacetan komunikasi sering terjadi. Fungsi partai politik dalam rekrutmen pemimpin nasional dipertanyakan efektivitasnya. Bahkan dalam kasus pemilu legislatif dan pemilu presiden, tidak banyak pimpinan nasional yang terlahir dari partai politik. Fungsi partai sebagai kanalisasi konflik pun kerap tidak berjalan. Alih-alih

menjadi sarana penyelesaian konflik, partai politik malah sering dilanda konflik internal yang berujung pada perpecahan partai. Demikian pula fungsi partai dalam melakukan pendidikan (sosialisasi) politik masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Interaksi jajaran partai dengan warga tidak diikuti peningkatan kemelekwacanaan warga tentang masalah-masalah politik (*civic literacy*).

Betapa pun masih banyak masalah melilit kehidupan partai di tanah air, namun sulit mengganti peran partai dalam sistem politik modern. Politik modern tanpa partai politik sama saja dengan ikan yang berada di luar air. Dari semua alat yang pernah didesain manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, partai politik merupakan instrumen paling ampuh dan absah. Keniscayaan partai politik dalam politik modern mudah dipahami karena memanuver adalah jiwa atau nyawa politik, dan partai adalah mesin untuk melakukan manuver politik yang paling lentur. Ketika mesin politik tengah mencari bentuk yang sesuai dengan postur masyarakatnya, maka partai politik mau tidak mau harus menyesuaikan dirinya dengan budaya politik (*political culture*) yang dianut masyarakatnya.

Runtuhnya Orde Baru menjadi titik kebangkitan pluralisme ideologi politik partai. Agama dijadikan asas partai. Perkembangan ini dapat dipandang sebagai antitesis kehidupan partai politik pada masa Orde Baru karena dua alasan. Pertama, dilihat dari jumlahnya

terdapat puluhan partai yang lolos verifikasi menjelang Pemilu 1999. Tercatat 48 partai politik menjadi peserta Pemilu 1999 dan 24 partai politik bersaing dalam Pemilu 2004. Terdapat banyak partai yang memiliki filogeni (sejarah kekerabatan) baik yang berlatar agama maupun klaim ideologi tertentu. Proliferasi dalam jumlah terjadi karena sejak berakhirnya Orde Baru jumlah partai tidak dibatasi. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya tidak membatasi jumlah partai. Keragaman asas atau ciri partai dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila.

Kedua, terdapat beberapa partai yang memiliki kesamaan nama dan lambang dengan partai politik yang hidup pada dekade 1945-1965. Fenomena ini memunculkan anggapan bahwa partai politik yang lahir pada 1998 sebagian merupakan reinkarnasi partai politik yang bertarung pada masa demokrasi parlementer. Suatu masa yang diwarnai pertarungan ideologis antara lima aliran pemikiran politik Indonesia, yakni “komunisme, tradisionalisme Jawa, nasionalisme radikal, sosialisme radikal, dan aliran pemikiran Islam” (Feith & Castles, 1970: 14).

Namun hasil Pemilu 1999 menunjukkan dukungan terhadap partai-partai tersebut amat rendah. Partai-partai yang dianggap bereinkarnasi tersebut gagal mengukuhkan dirinya sebagai satu-satunya pewaris

ideologis paling absah dari salah satu aliran pemikiran politik tadi.

Selain menguatnya isu primordial, kemunculan partai politik menjelang Pemilu 1999 ditandai oleh absennya platform yang dapat menggugah partisipasi publik. Fenomena ini memunculkan dugaan bahwa keputusan yang diambil pemilih saat memberikan suara dan loyalitas yang terbangun di kalangan para anggota tidak didasarkan atas pemahaman tentang platform partai.

Dikaji dari perspektif komunikasi politik, kedua fenomena yang menandai kehidupan partai politik Pasca Orde Baru terkait dengan dua masalah utama. Kesatu, kaburnya makna nilai-nilai dasar yang melandasi cita-cita partai (*political platform*). Kedua, pola kepemimpinan partai yang tidak kondusif bagi tumbuhnya demokrasi internal partai.

Political Platform

Hadirin yang saya hormati,

Partai politik didirikan di atas nilai dasar yang melandasi cita-cita mewujudkan masyarakat terbaik (*khoerul bariyyah*). Partai politik adalah alat untuk mewujudkan – atau kendaraan yang akan mengantarkan penumpangnya pada - preferensi tentang masyarakat dan negara yang dicita-citakan. Nilai dasar yang melandasi cita-cita partai itulah yang lazim disebut platform politik (*political platform*).

Bila partai politik diibaratkan tubuh, maka platform adalah jiwanya. Partai politik adalah “raga”, tempat di mana platform mengambil bentuk dalam wujud pemikiran dan tindakan politik.

Secara teori, pemahaman para fungsionaris, anggota, simpatisan dan masyarakat secara keseluruhan tentang platform partai amat penting. Platform partai merupakan landasan dan motivasi pelebagaan fungsi partai politik, spirit yang melandasi hubungan partai dengan kelompok populis tertentu dan hubungan pemimpin-pengikut di dalam organisasi. Selain itu, platform berperan sebagai kerangka dasar pengambilan keputusan, sekaligus sebagai dasar untuk membina derajat otonomi partai terhadap organisasi politik lain. Lebih dari itu, platform memainkan fungsi dalam mengembangkan imajinasi publik tentang eksistensi partai dan cita-cita yang hendak diperjuangkannya.

Sejumlah penelitian menegaskan signifikansi nilai sebagai variabel penting yang menentukan corak hubungan warga dan partai politik. Nilai membentuk dasar yang kuat bagi identitas politik warga negara, sekaligus rujukan ketika mereka harus memilih kandidat, atau menyikapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah {Nelson & Garst, 2005}. Lebih dari itu, nilai-nilai politik pun dipandang sebagai mata air yang penting bagi tumbuh suburnya sikap politik (Feldman, 1988; Feldman & Zailer, 1992). Hasil penelitian penulis pun mengkonfirmasi nilai dan orientasi beroleh berkah

(“tabaruk politik”) ketika pemilih “manut” pada kiai sebagai jalan keluar ketika pemilih kebingungan dalam menentukan pilihan politiknya (Suryadi, 2006).

Platform partai sering kali ditanggapi dengan sinisme, sebagai dokumen tidak bermakna yang sarat dengan retorika agung (*lofty rhetoric*). Rumusnya sering dituding hanya didesain untuk mendapatkan dukungan pemilih. Meskipun demikian, platform telah ada sepanjang partai politik ada dengan fungsinya yang nyata dalam mengarahkan pandangan pemilih. Hal senada diungkapkan Paulson (2000: 1042), yang memaknai platform sebagai alat (*devices*) sekaligus doktrin khusus (*special pledge*). Platform adalah alat dengan mana partai politik menonjolkan keberhasilannya dan mengambil sikap kritis atas oposisi. Platform juga mengandung doktrin khusus (*special pledge*) tentang tujuan kebijakan yang diharapkan dicapai partai pada masa mendatang. Fungsi platform adalah membantu partai dalam memperluas dukungan politis bagi kemenangan partai di hari pemilihan.

Kedua fungsi platform tadi hanya mungkin terwujud apabila rumusan platform mampu menawarkan sejumlah informasi penting kepada publik. Sekurang-kurangnya membantu pemilih dalam merangkum dan mengkristalisasi pandangan mereka tentang partai politik dan kandidat yang bertarung di bawah bendera partai. Platform memberi isyarat ketika partai melanjutkan alur tradisi panjangnya, dan memberi

peringatan dini ketika partai merusak landasan ideologisnya sendiri.

Platform politik adalah pembeda partai yang satu dengan lainnya. Keberbedaan nilai-nilai yang dianut dan preferensi tentang masyarakat dan negara yang dicita-citakan menjadi rujukan bagi warga ketika ia harus mengidentifikasi kepartaiannya.

Identifikasi kepartaian merupakan variabel penting yang akan menentukan mekanisme sistem politik yang sehat. Identifikasi kepartaian akan mempengaruhi bagaimana cara orang mendefinisikan isu dan menanggapi kehadiran seorang kandidat pejabat publik. Dalam jangka panjang, identifikasi kepartaian memupuk *partisanship*, yakni ikatan emosional warga terhadap partai politik.

Identifikasi kepartaian tak akan terbentuk, dan karenanya tak ada alasan untuk berharap terbangunnya *partisanship* bila politisi dan partai politik tidak menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai tertentu. Bahkan warga akan makin tidak peduli terhadap keberadaan sebuah partai, bila politisi dengan mudah berpindah-pindah partai layaknya kutu loncat.

Sebagai organisasi yang didasarkan atas sistem nilai, aktivitas partai politik diarahkan untuk mencapai tujuan (*teleologis*) yang dirumuskan berdasarkan rujukan tertentu. Saat perumusan tujuan inilah para pendiri partai menoleh kepada nilai-nilai sosial budaya dan agama yang dianut. Interaksi antara partai politik

dengan sistem sosial dan sistem politik – termasuk lingkungan luar-dalam masyarakat (*intra-extra societal environment*) – sudah terjadi sejak perumusan platform.

Secara sosiologis, kemunculan partai politik modern didorong oleh beberapa kecenderungan sejarah yang amat luas, khususnya dalam hal “*secularization, the rise of voluntary association, and development of a communication network*” (LaPalombara & Weiner, 1966 dalam Sherman & Kolker, 1997: 216). Keberadaan partai politik dikukuhkan oleh perkembangan lembaga-lembaga perwakilan, meningkatnya frekuensi pemilihan umum secara teratur, dan perluasan hak untuk memilih.

Keyakinan bahwa tindakan individu dapat mempengaruhi hasil pekerjaan dalam cara-cara yang sesuai dengan minatnya telah mengukuhkan eksistensi partai modern. Keyakinan tadi menempatkan partai politik sebagai alat untuk mewujudkan apa yang diusahakan manusia. Kemunculan partai politik modern dimungkinkan pula oleh kebiasaan untuk bekerja sama di dalam organisasi sukarela sebagai saluran untuk memperjuangkan kepentingan. Oleh karena itu, secara teori tidak ada tempat bagi kandidat atau aktivis yang muncul tiba-tiba. Kemandirian dan kesukarelaan warga dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi (*volunteerism*) merupakan prasyarat keterlibatan seseorang dalam proses politik (Suryadi, 2009). Pertumbuhan partai politik modern dipercepat oleh perkembangan jaringan komunikasi dan transportasi

yang ekstensif yang diperlukan untuk memelihara kontak antara pemimpin dan pengikutnya.

Partai politik bukan satu-satunya aktor politik. Terdapat beragam organisasi politik yang bertindak sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan negara maupun antarwarga negara. Relasi antara partai politik dengan organisasi politik lain tercermin di dalam bentuk-bentuk kerja sama, kompetisi, serta pilihan bentuk dan derajat partisipasi dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan. Idealnya relasi tadi bukan hanya digerakkan oleh kepentingan pragmatis, tetapi juga berlandaskan kepada kesamaan preferensi ideologi politik (*political platform*).

Walaupun saat diproklamasikan Indonesia tidak mengenal partai politik (dalam pengertian modern), peran partai politik dalam kehidupan nasional segera tampak dalam beberapa bulan setelah Indonesia merdeka. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 telah membuka jalan bagi didirikannya partai politik guna memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Maklumat itu pun menyiratkan pandangan pemerintah yang menempatkan partai politik sebagai wadah bagi semua paham yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat dipimpin ke jalan yang teratur.

Oleh karena itu, meskipun mengalami pasang surut dalam perkembangannya, bersama-sama dengan kaum cendekiawan yang tidak terikat (*unattached intellectuals*),

partai politik telah menjadi sumber pemikiran politik. Hal ini dimungkinkan karena sebagai *systems of ideas*, partai politik dalam kurun 1945-1965 telah mampu memberikan jawaban ideologis atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul menyertai cepatnya perubahan masyarakat dan sistem nilainya (Feith, 1970: 6), selain telah menjadi sarana bagi *alternation of power*; atau pergeseran kekuasaan antarpolitical politik (Dhakidae, 1981: 212).

Kejelasan platform partai dan kemampuan mengkomunikasikannya sama pentingnya dengan komitmen partai terhadap cara-cara konstitusional dalam mewujudkan tujuan-tujuan politiknya. Komitmen tadi melandasi usaha partai dalam meyakinkan masyarakat tentang kebenaran cita-citanya, dan menguji kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam pemilihan umum secara periodik.

Ideologi bangsa menjadi kerangka umum perumusan platform. Dalam prosesnya, peran para pendiri partai amat dominan. Merekalah yang merangkum pandangan umum tersebut ke dalam seperangkat perspektif yang kemudian diklaim sebagai ideologi partai. Ideologi menjadi pandangan hidup warga partai, yang meski bernada stereotif namun berguna dalam membangun identitas kepartaian.

Namun demikian, dalam praktiknya, ideologi tidak selalu menjadi rujukan utama ketika partai politik menentukan posisinya terhadap sebuah isu. Di samping

mempertimbangkan aspek-aspek ideologis, partai politik memperhitungkan pula kepentingan ekonomi atau tuntutan khusus kekuatan sosial tertentu.

Paulson (2000: 1043) merangkum tiga pandangan dominan yang lazim dianut partai politik dalam merumuskan posisinya terhadap sebuah isu. Pertama, lazim disebut *the responsible parties model*, menegaskan bahwa partai mengembangkan kebijakan publik berlandaskan kepada ideologi. Pandangan kedua, yang dikenal sebagai *the economic rationality model*, menyatakan bahwa partai harus lebih mempertimbangkan opini publik dalam memformulasi kebijakan dan posisinya. Masing-masing partai politik akan memaksimalkan dukungannya dengan memperhitungkan opini publik dengan tujuan mengadopsi posisi yang mencerminkan pandangan dominan. Pandangan ketiga, yang lazim disebut *cleavage theory*, menegaskan bahwa meskipun partai politik dipengaruhi opini publik dalam usahanya memaksimalkan dukungan pemilih, faktor lain harus dipertimbangkan pula. Faktor-faktor tersebut adalah pandangan aktivis, kelompok kepentingan, dan pemimpin partai politik.

Variasi sikap partai politik atas sebuah isu sebagaimana tercermin dari ketiga model di atas menyiratkan hal-hal berikut. Pertama, posisi yang diambil partai politik atas sebuah isu tidak selalu mencerminkan ideologi yang menjadi nilai dasarnya. Sikap ini akan mengundang kritik bahwa partai politik

tersebut telah terjebak ke dalam fragmatisme sampai pada derajat mengabaikan tuntutan ideologisnya, dan hanya menjadikan platform sebagai aksesoris politik.

Kedua, terlepas dari tarikan kepentingan ideologis versus ekonomis, partai akan selalu mencitrakan dirinya bersahabat dengan opini publik (*public opinion friendly*). Langkah ini diambil bukan semata-mata untuk merangkum dan merepresentasikan pandangan dominan, tetapi juga merupakan langkah generik yang ditempuh partai politik dalam mempertahankan posisi yang dekat dengan pusat politik. Langkah ini memunculkan kecenderungan partai politik untuk mengambil sikap yang sama terhadap sebuah isu. Kecenderungan ini akan mengundang kritik bahwa partai hanya mementingkan segelintir elit yang mendominasi partai, dan mengabaikan kepentingan massa. Selain akan dikesankan tidak memiliki preferensi ideologis yang jelas, sikap ini akan memperlemah kepercayaan publik terhadap partai.

Kemampuan partai politik dalam menawarkan alternatif pilihan yang jelas dan berbeda bagi pemilihnya telah menjadi moral politik yang penting bagi masyarakat demokratis yang sehat. Kejelasan sikap partai politik berkontribusi besar dalam menumbuhkan preferensi politik masyarakat, yang pada gilirannya mendorong tumbuhnya partisipasi yang otonom (*autonomous participation*).

Kepemimpinan dan Manajemen Komunikasi Partai Politik

Hadirin yang saya hormati

Kepemimpinan partai dan manajemen komunikasi telah diidentifikasi sebagai faktor penting dalam proses komunikasi tentang platform dan kebijakan partai. Untuk kasus partai politik di Indonesia, signifikansi faktor kepemimpinan tampak dalam agresivitas partai-partai kecil pada masa demokrasi parlementer. Keunggulan pemimpin-pemimpin kharismatik partai politik lebih menonjol atau identik dengan kekuatan partainya sendiri. Faktor ini pula yang menjelaskan mengapa Syahrir dipilih menjadi Ketua Badan Pekerja dan selanjutnya dipilih pula menjadi Perdana Menteri walaupun partainya kalah dalam pemilu. (Dhakidae, 1981: 208).

Kasus yang hampir sama terulang pasca Pemilu 1999. Amien Rais tampak memainkan peran politik yang menentukan dan berhasil merebut jabatan politik yang penting. Padahal, partainya – Partai Amanat Nasional - dapat dikatakan kalah dalam perebutan suara pada Pemilu 1999. Seperti halnya Syahrir di Partai Sosialis Indonesia, Amien Rais adalah tokoh kunci di Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain kepemimpinan, iklim komunikasi adalah faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi kebijakan. Hal ini mudah dipahami karena kebijakan hanya akan mendatangkan implikasi setelah dikomunikasikan.

Komunikasi menjadi keniscayaan karena “fakta, gagasan, (bahkan kebijakan) tidak akan berpengaruh sebelum ia diketahui” (Graber, 1981: 197).

Studi tentang kepemimpinan di Indonesia mengungkapkan bahwa kekuatan politik pada masa revolusi berada di tangan pemimpin terkemuka (*primus inter pares*). Mereka umumnya adalah tokoh-tokoh yang ikut berjuang merebut kemerdekaan. Namun dalam analisis Feith (1962: 100), tidak semua pemimpin terkemuka berpengaruh pada periode 1949-1957, “hanya sedikit dari mereka yang terlibat dalam perjuangan revolusi berada pada kedudukan politis yang kuat pada tahun-tahun berikutnya”.

Keberadaan sekelompok orang yang memainkan peran politik lebih menonjol dan menentukan adalah realitas politik yang tak terbantahkan. Kelompok ini lazim disebut elit politik. Di dalam literatur tentang teori elit, kelompok ini disebut dalam istilah yang berbeda. Pareto menyebutnya sebagai elit yang memerintah (*the ruling elites*), Mosca menyebutnya kelas yang berkuasa (*the ruling class*), dan Gasset menyebutnya sebagai orang-orang terpilih (*the chosen people*).

Dalam masyarakat politik, kemunculan elit politik sudah menjadi keniscayaan. Dalam pandangan Pareto (1955, dalam Heywood, 2002: 79) “kebutuhan akan sirkulasi elit berlangsung dari waktu ke waktu untuk mempertahankan keseimbangan sosial”. Seperti halnya Pareto, Mosca setuju bahwa kemunculan elit disebabkan

karena perbedaan dalam kecakapan untuk memerintah dan melakukan pengawasan politik. Namun menurut Mosca (1939, dalam Gandhi, 1985: 119) hal terpenting yang dapat menjelaskan eksistensi kelompok elit adalah sebab-sebab sosiologis, yakni keinginan dan cita-cita baru di masyarakat yang muncul sebagai akibat proses sirkulasi elit yang dipercepat. Dalam pemunculan keinginan dan cita-cita tersebut, kelompok minoritas mendominasi mayoritas massa. Hal ini terkait fakta bahwa minoritas terorganisir, sedangkan individu dalam mayoritas berjalan sendiri-sendiri. Minoritas biasanya terdiri atas individu-individu superior. Kesemua ini berlandaskan “political formula”, bahwa pada setiap masyarakat, elit yang memerintah berusaha mencari sebuah dasar legal dan moral bagi tindakan mereka sebagai pemelihara kekuatan.

Gasset (1932, dalam Gandhi, 1985: 120) yang mengeksplorasi pandangan para peletak dasar teori elit menandakan bahwa kebesaran masyarakat bergantung kepada kapasitas “orang-orang terpilih” (*the chosen people*). Orang-orang terpilih adalah mereka yang terkemuka dan pemimpin massa, meski dalam kenyataannya mereka tidak benar-benar terpilih. Kebesaran masyarakat bergantung kepada orang-orang, publik (*the public*), sekelompok orang yang tak terorganisir (*the crowds*), dan massa (*the masses*) untuk menemukan orang-orang terpilih.

Elit politik merupakan satu dari tiga dimensi vertikal politik Indonesia. Dua lainnya adalah publik dan massa. Studi empiris tentang masalah ini telah dilakukan Feith (1962: 108), yang mengkategorikan komunitas politik ke dalam tiga tipe. Elit politik (*the political elite*) berada di pusat lingkaran. Lingkaran tengah, mencakup orang-orang yang memiliki pengaruh yang kurang. Kelompok ini disebut publik (*the political public*), meliputi mereka yang melihat dirinya mampu mengambil peran yang akan berpengaruh terhadap politik atau pemerintah. Terakhir, menempati lingkaran paling luar adalah kelompok yang memiliki pengaruh paling kecil. Kelompok ini disebut massa (*the mass*), atau mereka yang tidak termasuk publik.

Dengan demikian, elit politik adalah bagian terkecil dari komunitas politik namun dengan pengaruh paling besar. Keberadaannya menjadi *nucleus* (inti) komunitas politik. Pengaruh mereka bertambah besar dalam masyarakat dengan budaya ketimuran (*oriental culture*), yang menempatkan agama dan kesukuan sebagai basis orientasi politik.

Preferensi agama dan kesukuan dapat menjadi landasan fundamental bagi kohesivitas masyarakat. Namun bila tidak dikelola dengan baik, ia dapat memunculkan kultus pribadi. Kultus inilah yang oleh Wittfogel (1957: 336) dinilai berbahaya bagi tatanan masyarakat demokratis, karena dapat menjadi jalan menuju “despotisme ala ketimuran” (*oriental despotism*),

yakni lahirnya pemimpin lalim yang mempraktikkan “total power”. Despotisme semacam ini ditandai hilangnya pengawasan konstitusional dan sosial yang efektif.

Elit, publik dan massa adalah dimensi-dimensi vertikal politik Indonesia. Sedangkan “administrators” dan “solidarity makers” adalah dimensi horizontal politik Indonesia. Karakter tadi akan menentukan kekuasaan dan pengaruh masing-masing segmen dalam dimensi vertikal. Kedua kelompok inilah yang mendominasi konflik yang terjadi pada masa revolusi, sebagaimana diungkapkan Feith (1962: 113), bahwa situasi Indonesia pada masa revolusi telah menciptakan konflik antara “administrators” (pemimpin dengan kemampuan teknis, administratif, penguasaan hukum dan bahasa asing kemudian beralih menjadi aparat negara modern) dan “solidarity makers”, (pemimpin dengan keterampilan sebagai mediator antara kelompok yang berbeda derajat kemodernan dan keefektifan berpolitikanya). Pemimpin dengan karakter *solidarity makers* adalah pengorganisir massa dan manipulator simbol yang tangguh.

Konflik antara “administrator” dan “solidarity makers” antara lain terjadi akibat perbedaan klaim tentang siapa yang layak memimpin. Kelayakan tadi sebagian terkait dengan kecakapan-kecakapan khusus yang dibutuhkan, sedangkan sebagian lainnya menyangkut kemampuan sang pemimpin dalam

menangkap “semangat zaman”, yang begitu gandrung terhadap persatuan dan kebangsaan.

Dalam batas-batas tertentu, perseteruan di antara kedua kelompok ini melibatkan cara pandang yang berbeda tentang apa yang menentukan kepemimpinan, apakah kualifikasi formal atau kemampuan memimpin yang sesungguhnya. “Administrator” berlomba untuk berkuasa berlandaskan klaim bahwa keterampilan teknis dan status yang mereka peroleh sebagai penghargaan atas keterampilan teknis dan prestasi mereka. Karena itu, kepemimpinan dalam birokrasi - sipil dan militer - dan partai politik layak mereka dapatkan atas dasar klaim utama: kelompok terdidik memiliki hak untuk memimpin. Selain itu, kelompok ini pun menegaskan bahwa penghargaan sosial mengacu kepada ukuran yang sama, yakni kualifikasi akademik, keterampilan profesional, serta pemahaman budaya dan intelektual.

Di sisi lain, “solidarity makers” bersaing untuk jabatan-jabatan politis atas dasar kemampuan mengorganisir massa dan status yang mereka peroleh. Mereka merasa berhak memimpin atas klaim dekat dengan rakyat dan memahami keinginan mereka. Kelompok ini menekankan bahwa yang menentukan “harga sosial” (*prestige*) bukan kualifikasi formal, tetapi kepemimpinan (politik) yang sebenarnya dan pengabdian kepada bangsa dan rakyat.

Studi empiris tentang elit politik Indonesia dilakukan pula oleh Emmerson (1976). Dalam studi

Emmerson (1976: 24), elit dibatasi pada pejabat tinggi birokrasi pusat dan anggota parlemen nasional. Lebih jauh Emmerson mengungkapkan, selain menampilkan beberapa tokoh, sistem politik Indonesia digerakkan oleh para elit yang lahir karena status keluarga, etnisitas, agama, sekolah, asosiasi, pekerjaan, keterlibatan dalam revolusi, dan status kelembagaan. Kelompok inilah yang kemudian melahirkan budaya elit politik (*elite political culture*), yakni seperangkat pandangan yang relevan secara politik yang tumbuh dari *interplay* yang konstan antara pola-pola kepemilikan dan pemaknaan – yang dipahami dalam konteks etnik dan agama, serta kelembagaan dan keorganisasian, sebagaimana telah memberi warna kepada - dan ditafsirkan melalui - pengalaman.

Meskipun tidak secara tegas muncul sebagai bentuk ketegangan baru antara pemimpin bercorak “administrators” dan “solidarity makers”, pemikiran yang melekatkan kapabilitas politisi pada hal-hal yang bersifat primordial di satu sisi, dan kompetensi di sisi lain sering mencuat ke permukaan. Sulit dipungkiri, primordialisme masih menjadi basis modernisasi politik di tanah air. Meski sebagian cara-cara modern telah diadopsi partai politik, namun belum sepenuhnya menanggalkan cara lama. Proses politik yang didasarkan atas asal-usul, silsilah, dan faktor-faktor yang dibawa sejak lahir masih kuat hingga memunculkan tuduhan seakan-akan telah terbangun “dinasti politik”.

Penempatan figur sebagai strategi untuk mengikat konstituen menjadikan keluarga-penguasa sebagai kekuatan yang mengendalikan pendulum politik partai. Sedemikian pentingnya peran politik keluarga-penguasa, maka perhatian para pencari kekuasaan tertuju pada pola kekuasaan keluarga sebagai miniatur pola kekuasaan partai.

Sebagian partai tampak kesulitan memainkan perannya sebagai representasi kepentingan pengikut, melainkan hanya mengukuhkan dominasi kaukus yang dibentuk tokoh-tokoh senior partai (*gerontocracy*). Kecenderungan ini mengukuhkan keberlakuan hukum besi oligarkhi, dimana aristokrat tradisional – termasuk para sesepuh - berperan sebagai *oligoi-oligoi* yang mengendalikan partai.

Primordialisme versi baru muncul dalam konteks pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), atau pemilu legislatif. Penempatan calon legislatif (caleg) yang berlindung di balik kebesaran nama orang tua, suami, atau leluhur bisa menjadi bumerang terhadap tokoh yang menjadi kapstoknya. Bila sang anak tidak bisa menunjukkan *performance* yang diminta, ia bukan hanya melakukan harakiri politik hingga menutup jalan karier politiknya, tetapi juga mengikis kredibilitas tokoh yang menjadi patronnya.

Namun demikian, karena penempatan caleg yang dikenal dekat dengan keluarga-penguasa tersebut terkesan tiba-tiba, minus *track record*, dan hanya

mengandalkan pertalian keluarga maka kemunculannya tetap dipertanyakan publik. Bahkan dalam banyak kasus terkesan mencederai rasa keadilan karena kemunculan mereka menutup jenjang karier kader yang bekerja menghidupi partai dan meniti karier dari bawah.

Penempatan figur sebagai strategi untuk mengikat konstituen telah menyebabkan tidak terbangunnya wacana kritis di kalangan fungsionaris dan simpatisan partai. Strategi ini berujung pada kultus figur secara berlebihan, sambil membiarkan massa tetap terbenam dalam kebodohan. Inilah “tirai kebisuan” yang berbahaya, melindungi kebodohan dengan dalih politisi hadir untuk memberi apa yang diminta publik.

Komunikasi Politik dan Penguatan *Civic Literacy*

Hadirin yang saya hormati

Pertumbuhan asosiasi sukarela dan saling percaya antarwarga diakui sebagai elemen penting *social capital*. Di sisi lain, *civic literacy* dihubungkan dengan partisipasi politik dan pengetahuan politik. Namun demikian keduanya saling berkaitan. *Civic literacy* tidak lain adalah *the knowledge and ability capacity of citizens to make sense of their political world* (Milner, 2002). Dalam khasanah ilmu kewarganegaraan, *civic literacy* ditempatkan sebagai elemen dasar kebajikan politik warga negara (*political virtue of citizenship*). Di dalam *civic literacy* tersirat penguasaan bentuk pengetahuan politik. Sedangkan di

dalam *civic virtue* terkandung kemauan mempengaruhi keadaan sebagai manifestasi bentuk partisipasi politik.

Melalui partisipasi politik setiap warga memastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan keterampilan dan informasi yang menjadi landasan partisipasinya, warga mengawasi pelaksanaan kebijakan bagi perbaikan masyarakatnya. Melalui cara ini, ide pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat akan mendekati kenyataan.

Sayangnya partisipasi politik di Indonesia masih terbatas pada proses pemberian suara. Dalam pemilu/kada misalnya, rakyat hanya menjadi objek yang dimobilisasi. Meski hubungan kandidat dan pemilih dekat secara geografis, namun jauh secara psikologis. *Meeting in mind*, tidak terjadi. Kandidat tetap asing bagi pemilih, sehingga mereka menjatuhkan pilihan bukan atas dasar pertimbangan yang dibentuk melalui komunikasi politik yang intens. Kemunculan kandidat yang tidak menarik, kinerja partai politik dan kualitas keterwakilan yang rendah serta afluensi simbol politik yang diikuti kelangkaan barang dan jasa menjadi penyebab meningkatnya pemilih yang tidak datang ke tempat pemungutan suara.

Pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik dan kenegaraan (*civic literacy*) menjadi faktor penting bagi peningkatan kualitas keterwakilan dan demokrasi itu

sendiri. Sejumlah aksi untuk mendorong peningkatan *civic literacy* dapat dilakukan pemerintah dan partai politik. Perluasan kesempatan bagi publik untuk mendapatkan koran, atau penyebaran informasi yang dilakukan partai politik adalah dua dari sekian langkah penting penguatan *civic literacy*. Pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan *civic literacy* pun dapat dilakukan antara lain melalui penguatan penyiaran publik, atau pendidikan demokrasi berbasis televisi (*teledemocracy*).

Civic literacy penting bagi peningkatan kualitas partisipasi politik untuk memastikan bahwa keterlibatan rakyat dalam proses politik didasari oleh pengetahuan yang memadai. Dengan begitu, corak budaya politik pun akan mengalami perubahan. Bila selama ini budaya politik masih didominasi orientasi parokhialistik, dengan pengetahuan politik yang memadai rakyat akan merasa mampu mengubah keadaan dan bertindak menurut cara-cara yang rasional-kalkulatif.

Partisipasi warga negara yang dilandasi pengetahuan yang memadai diyakini akan menambah efikasinya. Dengan begitu masyarakat bukan saja memperoleh kepuasan atas keterlibatannya, tetapi juga makin membuka akses warga kepada sumber-sumber pendapatan sosial dan ekonomi. Keterbukaan semacam ini akan mendorong warga negara mengikuti informasi tentang pemerintah dan berbagai keputusan yang diambilnya. Kebutuhan semacam inilah yang

memungkinkan warga memiliki ikatan emosional untuk turut memikirkan apa yang dipertimbangkan pemerintah bagi perwujudan kebaikan bersama.

Sayangnya, pendidikan politik (sebagai bagian dari upaya membangun *civic literacy*) menjadi proses penting yang dilupakan partai politik di Indonesia. Tidak ada desain khusus pendidikan politik yang dijalankan partai hingga membuatnya tersambung secara ideologis dengan pemilih. Preferensi pemilih tidak dibangun di atas kesadaran tentang pentingnya platform dan program kerja partai politik dan kandidat, melainkan lebih karena transformasi loyalitas primordial ke dalam wilayah politik.

Kandidat menempuh jalan pintas menuju populer, memilih menjadi "bintang iklan" ketimbang memulai karier dalam asosiasi sukarela. Penyederhanaan komunikasi politik sebagai pemasaran politik menyebabkan pola hubungan kandidat dan calon pemilih tidak menyentuh aspek substantif.

Civic literacy sebagai alat sekaligus tujuan dapat diperkuat oleh pilihan kebijakan. Kebijakan untuk mendorong perluasan akses membaca koran dapat secara langsung memperkuat *civic literacy*. Di sisi lain, kontak warga dengan berbagai lembaga politik yang disepakati secara langsung dapat meningkatkan kualitas *civic literacy*.

Civic literacy bukan hanya dampak, ia juga penyebab. Tingkat *civic literacy* yang tinggi amat kondusif bagi pilihan kebijakan yang efisien.

Data menunjukkan terdapat hubungan nyata antara pilihan kebijakan, lembaga politik, dan hasil yang dicapai sistem politik (Sartori, 2001). Di Amerika, pendidikan menyumbang 40% perbedaan dalam tingkat partisipasi memilih pada level individual, meskipun terdapat beberapa negara memiliki rata-rata *turnout* lebih tinggi dengan rata-rata tingkat pendidikan lebih rendah (Franklin, 1996: 218-219). Selain pendidikan, tingkat konsumsi media adalah variabel lain yang berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik warga, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya angka *turnout* di kalangan warga pembaca koran (Milner, 2002).

Terkait dengan disparitas orientasi yang dapat mengikis orientasi kebangsaan di tengah-tengah kuatnya arus globalisme yang dihadirkan media massa di satu sisi dan ancaman primordialisme di sisi lain, hal-hal berikut perlu mendapat perhatian semua pihak. Usaha dimaksud bukan hanya perang syaraf melawan pengaruh buruk media global, tetapi usaha nyata penguatan *civic literacy* untuk mendorong transformasi budaya politik (*political culture*) dan perbaikan *performance* sistem politik.

Pertama, pembentukan kompetensi partisipatif sebagai dasar keterlibatan individu dalam perumusan agenda dan pembuatan kebijakan publik. Kompetensi

tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) kemampuan melihat masalah global dari perspektif dan kepentingan nasional; (2) mengembangkan sikap kooperatif dan tanggung jawab; (3) toleran terhadap keragaman budaya; (4) berpikir kritis, (5) menyelesaikan konflik secara damai; (6) hidup hemat dan efisien dalam memanfaatkan lingkungan; (7) menunjukkan komitmen terhadap penegakkan hukum dan hak asasi manusia; serta (8) kemampuan memahami mekanisme sistem politik, dan menguasai keterampilan politik.

Kedua, terdapat tiga agenda mendesak penataan kepartaian untuk mengoptimalkan fungsi komunikasi partai politik dalam meningkatkan kualitas *civic literacy*. Ketiga agenda tersebut adalah perampingan dan penguatan sistem kepartaian, pelembagaan perwakilan politik, dan regenerasi kepemimpinan dan penguatan kelompok-kelompok pro demokrasi. Penataan sistem kepartaian menjadi keharusan karena partai politik masih menjadi titik lemah transformasi sistem politik Indonesia yang demokratis.

Sekolah dan keluarga adalah lembaga yang secara konvensional ditugasi untuk menanamkan nilai-nilai yang dipandang sebagai kebaikan oleh masyarakatnya. Namun demikian, bukan berarti elemen masyarakat lain bisa terlepas dari tanggung jawab sosial tadi. Partai politik dan politisi pun harus terlibat dalam usaha membentuk kompetensi tadi. Bahkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara yang menerima amanah

Undang-Undang Dasar 1945 untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur harus berkomitmen tentang masalah ini.

Pilihan kebijakan di atas menjadi taruhan, bukan saja bagi kepentingan mempertahankan pemerintahan dalam jangka pendek, tetapi juga bagi nasib bangsa dalam jangka panjang. Tekanan hidup yang bertubi-tubi akan merusak komitmen sebagai warga bangsa, yang pada akhirnya menafikan pentingnya hidup bernegara.

Peran nyata partai politik sebagai mesin yang menjalankan roda pemerintahan dalam mengurangi penderitaan kolektif warga bangsa akibat himpitan krisis ekonomi, konflik politik, ancaman kekerasan, dan masalah-masalah sosial lainnya amat mendesak. Posisi yang diambil partai politik terhadap sebuah isu bukan saja akan memperjelas *positioning* partai, tetapi juga memberikan pendidikan politik. Pada gilirannya, *positioning* partai akan menjadi landasan preferensi politik warga, sehingga hubungan warga dengan partai bukan didasarkan atas faktor-faktor primordial semata, tetapi juga pertimbangan rasional.

Inovasi Nilai-nilai Komunikasi Politik

Hadirin yang saya hormati,

Modernisasi politik di Indonesia tidak identik dengan sekularisasi, melainkan terjadi dengan memadukan modernisme-tradisionalisme. Meskipun

penetapan pemimpin partai telah menempuh mekanisme formal, pengambilan keputusan masih merujuk kepada nilai-nilai kultural dan religius. Model pengambilan keputusan seperti ini bukan hanya menuntut pemaknaan atas simbol politik secara substantif, tetapi juga mempertimbangkan konteks secara arif.

Komunikasi politik tidak boleh disederhanakan maknanya hanya sebagai pemasaran politik. Lebih dari sekedar menjajakan kandidat dan partai politik, komunikasi politik bermakna pencerahan, pembentukan preferensi, sehingga khalayak mampu menunjukkan pemihakan dan posisinya atas isu atau kandidat tertentu.

Bagi masyarakat demokratis, penguatan *civic literacy* merupakan komponen vital. Tali-temali komunikasi politik dan penguatan *civic literacy* begitu kuat. Komunikasi politik yang baik akan mendongkrak kualitas *civic literacy*. Demikian pula sebaliknya, masyarakat yang melek politik akan menempatkan komunikasi politik sebagai instrumen transformasi demokratis.

Proses komunikasi politik belum dikatakan demokratis bila sekedar dijauhkan dari indoktrinasi ideologi yang dianut rezim. Masih jauh pula dari ruh demokrasi, bila atas nama demokratisasi komunikasi politik memaksakan sterilisasi muatan ideologis dari tendensi dan nilai-nilai politik. Hal terakhir penting, sebab komunikasi politik demokratis bukan depolitisasi,

apalagi domestifikasi, melainkan politik pemberdayaan dan pencerahan.

Partai politik adalah salah satu lembaga yang dapat mendongkrak kualitas *civic literacy* melalui rancang bangun pendidikan politik demokratis dan perbaikan pola-pola hubungan dengan konstituennya. Membuka saluran komunikasi dengan konstituen menjadi dasar tegaknya asas pemerintahan perwakilan. Komunikasi politik adalah tali penyambung rakyat dan partai politik, sekaligus sumber imaji tempat di mana harapan dipancarkan.

Keberhasilan dan kegagalan seorang politisi bergantung kepada perilaku komunikasinya. Mengingat peran yang dimainkannya dalam sistem sosial, politisi memikul banyak tanggung jawab dalam berbagai situasi. Kekuatan pesan politis tidak hanya terletak pada nilai yang dimunculkan, atau keanggotaan partai komunikator dan penerima, tetapi juga bergantung kepada cara-cara komunikator mempertimbangkan identitas sosial (konsep diri yang dibentuk karena keanggotaan dalam organisasi), identitas personal (konsep diri yang terbentuk karena kategorisasi diri), dan pengharapan audiens.

Perbaikan kualitas komunikasi antara partai dan konstituen serta aktor politik lain dipercaya akan meningkatkan kualitas *civic literacy* sebagai faktor determinan pembentukan warga negara otonom dan fungsional. Tanpa memperbaiki *civic literacy*, tidak ada

alasan untuk memperhitungkan efikasi partisipasi politik warga dan percepatan transformasi politik demokratis. Beberapa hal berikut penting dipertimbangkan dalam proses inovasi nilai dan fungsi komunikasi partai politik.

Pertama, menegaskan kebijakan negara yang fundamental sebagai *common platform* partai, sedangkan *political platform* sebagai pesan utama sekaligus rujukan dalam menentukan posisi atas sebuah isu, kandidat, dan sumber imaji bagi janji dan pilihan bahasa politik. Preferensi yang ditunjukkan partai politik akan membentuk dasar yang kuat bagi identitas politik warga.

Kedua, menempatkan kejujuran (kebenaran, kejelasan, dan keberadaan maksud) sebagai nilai dasar komunikasi politik; kepekaan dalam memaknai konteks komunikasi sebagai nilai instrumental; dan kesantunan dalam menampilkan diri sebagai nilai operasional. Orientasi nilai semacam ini didasarkan atas fakta bahwa apabila seorang komunikator mampu meringkaskan sebuah isu dengan nilai yang relevan dengan preferensi publik maka ia akan dapat mempengaruhi orang yang menempatkan prioritas tinggi terhadap nilai tersebut.

Ketiga, mengukur kemampuan diri sebelum berbicara tentang sebuah hal. Komunikator yang jujur hanya berbicara menyangkut bidang yang menjadi kewenangan dan atau kepakarannya. Sebuah pesan hanya akan memiliki efek persuasi apabila didukung argumen yang kuat dan penguasaan menyeluruh atas persoalan yang dibahas.

Keempat, memelihara hubungan *dyadic* antarwarga sebagai unsur utama modal sosial (*social capital*) sekaligus bauran penting dalam pembentukan kapasitas kewargaan (*civic capacity*). Ekspansi media tidak dapat menggantikan hubungan sosial antarwarga, termasuk hubungan antara politisi dan konstituen. Terdapat fakta bahwa alur informasi di antara para pemilih terjadi melalui hubungan yang dilandasi kepercayaan politis. Seseorang akan mencari seorang yang ahli dalam politik untuk menafsirkan pesan media meskipun secara politis tidak akan selalu setuju dengannya. Seorang warga mendapatkan informasi dari warga lain dan memberikan nilai khusus terhadap informasi tersebut.

Kelima, demi kesehatan dan vitalitas politik demokratis diperlukan transformasi komunikasi sosial dari cara-cara yang penuh intimidasi menuju cara-cara yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kedua pihak (*recreational discussion*). Informasi yang dikomunikasikan secara sosial amat penting karena pesan akan lebih personal dengan bias yang dapat dikenali.

Hadirin yang saya hormati

Sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, sekali lagi saya panjatkan puji dan syukur ke hadirat Ilahi Rabbi karena atas limpahan nikmat dan kuasa-Nya saya dapat merengkuh jabatan Guru Besar dalam bidang ilmu Komunikasi Politik pada Jurusan Pendidikan

Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pada kesempatan ini pula perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak, yang secara struktural dan kultural amat berjasa bagi pencapaian jabatan akademik guru besar ini.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., dan para Pembantu Rektor yang telah mendorong dan memberi peluang studi lanjut. Kepada Dekan FPIPS dan para Pembantu Dekan; Direktur dan staf Direktorat Sumber Daya yang telah memproses usul jabatan guru besar; Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan seluruh dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, yang telah menciptakan ruang dan iklim akademik yang kondusif untuk terus belajar dan mengembangkan diri.

Tanpa mengecilkan sumbangsih dosen yang lain, saya ingin mengapresiasi dorongan yang diberikan Prof. H.M. Numan Somantri, M.Sc. Ed., Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed., Prof. H. A. Kosasih Djahiri, Prof. Dr. Idu Affandi, S.H., Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, S.H., M.Pd., dan Prof. Dr. H. A. Azis Wahab, M.A..

Saya pun ingin mengapresiasi jasa para pembimbing skripsi, tesis dan disertasi, yang secara formal merupakan tonggak-tonggak pencapaian jenjang akademik jabatan guru besar ini. Kepada Prof. Drs. A.

Kosasih Djahiri dan Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H., selaku pembimbing skripsi; Prof. H. Santoso S. Hamidjojo, M.Sc., Ph. D., Prof. H. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., Drs. Hadi Suprpto Arifin, M.S., Prof. H. Kusnaka Adimihardja, M.A. Ph.D., Prof. Dr. Hj. Nina W. Syam, M.S., Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S., Prof. H. A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D., Prof. Josy Adiwisastra, Dr. Betty Sabur, M.S., dan (Alm) Prof. Barita Siregar, M.S. selaku pembimbing, promotor dan penelaah tesis dan disertasi.

Saya pun ingin mengapresiasi dukungan para sahabat, Prof. Dr. Hj. Attie Rachmatie, M.S., Dr. Cecep Darmawan, M.Si., Siti Nurbayani, S.Pd., M.Si., Dr. Suwatno, M.Si., Drs. H. Rahmat, M.Si. dan Saifullah, S.Pd., M.Si. dalam mendorong studi lanjut. Saya pun mendapat dorongan tak pernah henti untuk terus menulis, terutama dari Drs. Karna Yudibrata, Prof. H. A. Chaedar Al Wasilah, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Ishak Abdulhak, dan Prof. Dr. Didi Turmudzi, M.S.

Juga kepada sahabat-sahabat yang menghadirkan “dunia nyata”, hitam-putihnya wajah komunikasi politik, Drs. H. A.M Ruslan, Drs. Komir Bastaman, M.Si., Drs. Suhardi, M.Si., Prof, Dr, Didi Turmudzi, M.S., Dr. Wakhudin, K.H. Hamdun Ahmad, Ustad Abdul Muis dan Ustadz Ahmad Ciwaringin.

Tentu saja saya berhutang budi kepada para *sparing partners* saya, utamanya para mahasiswa PKn pada semua jenjang; Tim Sangkuriangan: Prof. E. Aminudin Aziz,

M.A., Ph.D., Prof. Dr. Agus Rahayu, M.S., Dr. Agus Setiabudhi, M.S., Dr. Asep Kadarohman, M.S., Dr. Dadang Sudana, M.A., serta Prof. Dr. Gurniwan Kamil Pasya, M.S. dan Dr. Elly Malihah, M.S.

Selain kepada pribadi-pribadi di atas, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang berperan penting dalam mengukuhkan keilmuan saya. Selain Jurusan PKN FPIPS UPI, juga Pascasarjana Unpad, tempat saya menimba ilmu, membimbing dan menguji S2 dan S3, Pascasarjana Unisba, Pascasarjana STKIP Pasundan, Universitas Subang, Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Wantanas (Dewan Ketahanan Nasional), TVRI, “Pikiran Rakyat”, STV Bandung, KPID Jawa Barat, dan Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Jawa Barat, *Nihon University, Civic Center Education*, dan *Heartland International*.

Pada kesempatan ini pula, saya ingin berterima kasih yang setulus-tulusnya, sekaligus mendedikasikan pencapaian jabatan akademik ini kepada orang tua saya Bapak Tatang dan Ibu Rumtasih, Ibu Sumarni, istri saya Tusti Setiawati, S.Pd., kakak dan adik (Eri, Oka, Ipung, Min, Rina) dan puteri saya Nadhila Zulfa Khairani, yang selalu hadir dengan jasa “injak-injaknya” di kala lelah melanda. Saya pun ingin mengenang jasa baik dan kasih sayang Bapak Triharto (Alm), yang telah dipanggil pulang ke Rahmatullah, kiranya Allah Swt. memberinya tempat yang mulia.

Tak ada kata-kata yang bisa mewakili dukungan luar biasa dari orang-orang hebat ini, hanya doa dan harapan kiranya Allah Swt. memberi pahala yang berlipat.

Hadirin yang saya muliakan,

Demikianlah buah pikiran yang ingin saya sampaikan dalam pengukuhan ini. Terima kasih atas kesabaran hadirin menyimak paparan ini, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi *kifarat* atas kesalahan yang telah kita lakukan, dan dicatat sebagai amal shaleh. Kita berharap, semoga Allah Swt. membimbing kita dengan kasih dan berkah-Nya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Daftar Pustaka

- Brownhill, Robert & Patricia Smart, 1989, *Political Education*, London & New York: Routledge.
- Budimansyah, Dasim & Karim Suryadi, 2008, *PKn dan Masyarakat Multikultural*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Clayton, Constance, 1992, "We Can Educate All Our Children" in Ryan and Cooper (1992), *Kaleidoscope: Reading in Education*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Crozier, Michael, 2007, "Recursive Governance: Contemporary Political Communication and Public Policy", in *Political Communication*, 24: 1 - 18, 2007, Routledge, Taylor & Francis Group, Inc.
- Dahlgren, Peter, 2005, "The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation", *Political Communication*, 22, 147-162, Routledge, Taylor & Francis Group, Inc.
- Deutsch, Karl W., 1963, *The Nerves of Government*, London: The Free Press of Glencoe.
- Dhakidae, Daniel, 1981, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", dalam Farchan Bulkin, 1995, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Diamond, Larry & Richard Gunther, 2000, *Political Parties and Democracy*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Dermody, J and Hanmer-Lloyd, 2003, "Segmenting

Young People's Voting Behaviour through Trusting-Distrusting Relationships", *Proceeding of the Academy of Marketing Political Marketing Conference*, University of Middlesex Business School, 18-20 September.

Emmerson, Donald K., 1976, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*, Cornell University Press.

Fagan, Madeline, 2009, "The Inseparability of Ethics and Politics: Rethinking the third in Emmanuel Levinas", in *Contemporary Political Theory*, 8, 1, 5-22, Palgrave Macmillan.

Feith, Herbert & Lance Castles, 1970, *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, USA: Cornell University.

Feith, Herbert, 1962, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, New York: Cornell University Press.

Feldman, S., 1988, "Structure and Consistency in Public Opinion: The Role of Core Belief and Values", *American Journal of Political Science*, 26, 446-466.

Feldman, S., & Zaller, J., 1992, "The Political Culture of Ambivalence: Ideological Responses to the Welfare-state", *American Journal of Political Science*, 32, 416-440.

Fin Jr. Chester E. 1991, "Teaching Democracy: Why and How It Must Be Taught in a Democratic Society", remark prepared for the Nicaraguan Civic Education Conference, Managua, Nicaragua, June, 1991.

Franklin, Mark N., 1996, "Electoral Participation", dalam

- Leduc Lawrence, Richard Niemi & Pippa Norris, eds., *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*, Thousand Oaks: Sage.
- Friedland, Lewis, Shah, Dhavan V, Ledd, Nam-Jim, 2007, "Capital, Consumption, Communication, and Citizenship: The Social Positioning of Taste and Civic Culture in the United States", in *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, ANNALS, AAPSS, May, 2007.
- Gandhi, Madan G, 1985, *Modern Political Analysis*, New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co.
- Graber, Doris, 1981, "Political Language", dalam Nimmo Dan D & Keith R. Sanders, 1981 *Handbook of Political Communication*, Beverly Hills, Sage Publications.
- Heywood, Andrew, 1998, *Political Ideologies: An Introduction*, London: MacMillan Press Ltd.
- Huckfeidt, Robert, 2001, "The Social Communication on Political Expertise", *American Journal of Political Science*, 45. (2), April 2001, 425-438.
- _____, 2007, "The Unanimity, Discord, and the Communication of Public Opinion", in *American Journal of Political Science*, 51, (4), October 2007, 978-995.
- Kamminga, Menno, 2008, "The Ethic of Climate Politics: Four Modes of Moral Discourse", in *Environmental Politics*, 17, (4), August 2007, 673-692.
- Lileker, Darren G, Nigel A. Jackson & Richard Scullion, 2006, *The Marketing of Political Parties: Political*

- Marketing at the 2005 British General Election*, Manchester and New York: Manchester University Press.
- Milner, Henry, 2002, *Civic Literacy: How Informed Citizens Make Democracy Work*, Tufts University: University Press of New England.
- Nelson, T.E. & Garst, J., 2005, "Values-based Political Messages and Persuasion Relationship among Speaker, Recipient, and Evoked Values", *Political Psychology*, 26, (4), 489-515.
- Paulson, Darryl, 2000, "Political Platforms", dalam Magill, Frank N, 2000, *International Encyclopedia of Government and Politics*, 2, Ram Nagar, New Delhi: S. Chand&Company Ltd.
- Plano, Jack C, Robert E. Riggs, & Helenan R. Robin, 1982, *The Dictionary of Political Analysis*, California: ABC-CLIO.
- Sartori, Giovanni, 2001, "The Party Effects of Electoral Systems", dalam Diamond, Larry & Richard Gunther, 2001, *Political Parties and Democracy*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Seligman, Adam B., 1992, *The Idea of Civil Society*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Sherman, Arnolk K, dan Aliza Kolker, 1987, *The Social Bases of Politics*, Belmont: Wardworth Publishing Company.

- Smith, Craig Allen, 1990, *Political Communication*, Florida: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Suryadi, Karim dan Meita P. Agustin, 2010, "Pemanfaatan Internet dan Tantangan Karakter Bangsa" *Jurnal Komunikasi dan Media* (terakreditasi Dikti), 4, (1), Jakarta, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, 2010.
- Suryaadi, Karim, 2009, "Membangun Wawasan Kebangsaan Partai Politik: Perspektif Komunikasi Politik", *Jurnal Sekretariat Negara RI NEGARAWAN*, No. 14, Jakarta, Sekretariat Negara, November 2009.
- _____, 2008, "Transformasi Simbol-simbol Islam-Politik dalam Pusaran Arus Pragmatisme: Kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)", *Jurnal Pendidikan "Mimbar Pendidikan"* Nomor 1 Tahun XXXII Tahun 2008, Akreditasi No. 02/DIKTI/Kep/2002, hal 34-42.
- _____, 2007, "Media Massa dan "Political Literacy": Pemanfaatan Berita Politik di Kalangan Remaja Kota Bandung". *Mediator Jurnal Komunikasi*, 8, (1), Juni 2007, Akreditasi No. 56/DIKTI/Kep/2007, hal: 139-152.
- _____, 2007, "Budaya Komunikasi Politik Santri: Penetrasi Simbol Agama ke dalam Pola Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5, (3) September – Desember 2007, Akreditasi No. 26/DIKTI /Kep/2007, hal: 139-152'

- _____, 2006, *Kedudukan Platform, Komunikasi Politik Kiai, dan Identifikasi Kepartaian*, disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, tidak diterbitkan.
- van Zoonen, Liesbet, 2005, *Entertaining The Citizen: When Politics and Popular Culture Converge*, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Wittfogel, Karl, 1957, "Oriental Despotism", dalam Curtis, Michael (penyunting), 1962, *The Nature of Politics*, hlm 336-343, USA: Avon Books Division, The Hearst Corporation.
- Woodly, Deva, 2008, "New Competencies in Democratic Communication: Blog, Agenda Setting, and Political Participation", Published online, 8 August 2007, Springer Science+Business Media, BV.

CURRICULUM VITAE



1. Nama : Karim Suryadi
2. Tempat dan tanggal lahir : Subang, 14 Agustus 1970
3. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19700814199402.1.001
4. Jabatan : Guru Besar Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (tmt 1 Agustus 2009)
5. Status : Kawin
Istri : Tusti Setiawati, S.Pd.
Anak : Nadhila Zulfa Khairani

6. Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Sekolah Dasar Negeri Pasanggrahan I, Subang, lulus tahun 1982.
 - b. SMP Negeri 2 Subang, lulus tahun 1985.
 - c. SPG Negeri Subang, lulus tahun 1988.
 - d. Sarjana Pendidikan Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung, lulus 1993.
 - e. Magister Ilmu Sosial (Bidang Kajian Utama Ilmu Komunikasi), Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, lulus 1999.
 - f. Doktor Ilmu Sosial (Komunikasi Politik), PPS Unpad, lulus 2006.
 - g. *Training for Educator and Community Leader, Heartland International, USA, 2007.*

7. Pengalaman Kerja
 - a. CPNS pada Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung, 1 Februari 1994.
 - b. Ketua Penyunting Jurnal Civicus Jurusan PMPKN, 2007- sekarang.
 - c. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Subang, Yayasan Kutawaringin, Subang, 2007.
 - d. Direktur Riset pada Lembaga Riset Informasi (LRI), Johan Polling, Jakarta, 2007.
 - e. Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FPIPS, 30 Maret 2009 - 20 Agustus 2010.

- f. Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 20 Agustus 2010 - sekarang.
- g. Pelaksana Tugas Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FPIPS, 20 September 2010 - sekarang.
- h. Dosen Tamu pada *College of International Relations, Nihon University, Japan*, 2008.

8. Karya Ilmiah

a. Buku

- 1) “Balihocracy”: Komunikasi Politik dan Orientasi Pemasaran dalam Pemilu, Bandung, Pusat Studi Agama dan Pembangunan, Yayasan Indonesia Gemilang, Cet. 1, 2009.
- 2) Sistem dan Kebijakan Komunikasi Penyiaran di Indonesia, Bandung, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar), Cet. 1, Maret 2009.
- 3) PKN dan Masyarakat Multi Kultural, Bandung, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI, Cet. 1, Mei 2008.
- 4) Etnopedagogi: Landasan Praktik Pendidikan dan Pendidikan Guru, Bandung, PT Kiblat Buku Utama, Cet. 1, Maret 2009.

- 5) Anggota Editor Buku *Dinamika Penyiaran di Jawa Barat*, Bandung, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Cet. 1, Februari 2008.
 - 6) Ketua Editor buku *Potret Profesionalisme Guru dalam Membangun Karakter Bangsa: Pengalaman Indonesia dan Malaysia*, Bandung, UPI Press, Cet. 1, 2010.
- b. Publikasi Hasil Penelitian (Tiga Tahun Terakhir)
- 1) *Pemanfaatan Internet dan Tantangan Karakter Bangsa* (ditulis bersama Meita P. Agustin), *Jurnal Komunikasi dan Media* (terakreditasi Dikti), Vol. 4, No. 1, Jakarta, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, 2010.
 - 2) *Membangun Wawasan Kebangsaan Partai Politik: Perspektif Komunikasi Politik*, *Jurnal Sekretariat Negara RI NEGARAWAN*, No. 14, Jakarta, Sekretariat Negara, November 2009.
 - 3) *Pemilihan Presiden Secara Langsung di Jawa Barat: Implikasinya Bagi Pendidikan Pemilih*, *Jurnal Pendidikan "Mimbar Pendidikan"* Nomor 3 Tahun XXV Tahun 2006, akreditasi No. 02/DIKTI/Kep/2002, hal: 44-50.

- 4) Transformasi Simbol-simbol Islam-Politik dalam Pusaran Arus Pragmatisme: Kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jurnal Pendidikan “Mimbar Pendidikan” Nomor 1 Tahun XXXII Tahun 2008, Akreditasi No. 02/DIKTI/Kep/2002, hal 34-42.
- 5) Media Massa dan “Political Literacy”: Pemanfaatan Berita Politik di Kalangan Remaja Kota Bandung. “Mediator “ Jurnal Komunikasi, Vol. 8 No. 1 Juni 2007, Akreditasi No. 56/DIKTI/Kep/2007, hal: 139-152.
- 6) Budaya Komunikasi Politik Santri: Penetrasi Simbol Agama ke dalam Pola Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5 No. 3 September – Desember 2007, Akreditasi No. 26/DIKTI /Kep/2007, hal: 139-152
- 7) *Political News and Early Voter Alienation: Why does not Political Knowledge Lead Early Voter to Use their Right to Vote?, The Indonesian Journal of Communication Studies (IJCS), Vol. 1 No. 2 December, 2008, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.*
- 8) Media Penyiaran dan Pilkada: Perspektif Komunikasi Politik. Jurnal CIVICUS Vol. I,

- No. 6 Januari 2006, ISSN 1412-5463, hal. 439-443.
- 9) Nominasi Kandidat dan Pola Respon Warga: Agenda Masalah dan Kebutuhan Pendidikan Pemilih Kota Bandung. *Jurnal CIVICUS Vol. 1, No. 8 Januari 2007, ISSN 1412-5463, hal 545-552.*
- 10) Efikasi Partisipasi Politik Warga Negara: Bagaimanakah Partai Politik Menghubungkan Warga Dengan Sistem Politik ?, Jurnal CIVIKUS Vol.I , No. 6 Juni 2007, ISSN 1412-5463, hal 670-67.
- 11) Perilaku Memilih Masyarakat Jawa Barat dan Diskursus Calon Independen, Jurnal ISKI Bandung” ISSUE”, Vol. 1, No. 1 Agustus 2007, ISSN 1978-6328, hal. 55-64.
- 12) Pesan Politik di Ruang Publik: Pilihan-pilihan Sumber dan Media Bagi Pendidikan Pemilih, Jurnal ISKI Bandung “ISSUE”, Vol. 2 No. 1 Juni 2008, ISSN 1978-6328, hal. 65-74.
- 13) *Kiai's Political Communication and Party Identification : A Case Study of PKB (Nation Awakening Party) in The 1999 and 2004 General Election.* ARENA Jurnal Lintas Budaya & Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 3 No. 1, 2008, ISSN 1907-0705, hal. 45-63.

- 14) Transformasi Politik NU: Memutus Konflik yang Berulang, ARENA Jurnal Lintas Budaya & Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 4 No. 2, 2008, ISSN 1907-0705, Hal. 91-100.
- 15) Polling Presiden: Investasi atau Divestasi Bagi Demokrasi ?, ARENA Jurnal Lintas Budaya & Pembangunan Berkelanjutan, Vol.4, No. 1, 2009, ISSN 1901-0705, Hal. 75-86.
- 16) Media Massa, Kognisi dan Partisipasi Politik Remaja: Sebuah Hubungan Yang Ganjil, *Governance*, Jurnal Sinergi Masyarakat, Swasta dan Pemerintah yang Berkeadilan, Vol. 3, No. 9, Januari – Maret 2007, ISSN 1829-7544. Hal 1-10.
- 17) Partai Politik, *Civic Literacy* dan Mimpi Kemakmuran Rakyat, *Acta Civicus*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2, April 2008, ISSN 1978-8428, Hal. 147-156.

c. Makalah Seminar Nasional dan Internasional

- 1) *Political Parties, Civic Literacy and the Transformation of Democratic Politics: Experience of Indonesia Passing Through The Post-Reform Transition*, disajikan pada *The Annual Indonesian Scholar Conference in*

- Taiwan*, Southern Taiwan University, Tainan, Taiwan, March 20, 2010.
- 2) *Religion and Politics in Indonesia : Conflict Pattern and Political of Santri*, diseminarkan pada Seminar *Indonesia Graduate Students Mishima, Japan, July 1, 2008*).
 - 3) *Political Party, Civic Literacy and Dream About People Prosperity*, diseminarkan pada Seminar Indonesia Studies Students 3 Mishima, Japan, July 2, 2008)
 - 4) *Santri's Political Communication Culture : Transformation of Primordial Loyalty as Identification Basis For National Awakening Party/PKB*, diseminarkan Pada Seminar Indonesia Studies Student 4 Mishima, Japan, July 4, 2008).
 - 5) *Reconstructing Political Education: How to Make People's Political Participation Meaningful ?*, diseminarkan pada *3^d International Education Conference*, 25-26 November 2008, The Auditorium, UPSI Tanjong Malim, Perak Malaysia).
 - 6) *Agama dan Komunikasi Politik: Simbol-simbol Islam dalam Pusaran Arus Dramaturgi Politik Pasca Pemilu 1999*, disajikan pada Seminar Antar Bangsa pada Tanggal, 4-5 Februari 2008, di Bandung).

- 7) Persidangan Meja Bulat Pengurusan Persepsi Umum dalam Pembentukan Keselamatan Negara, CMIWS, UITM., disajikan pada Seminar Internasional, 28-29 Oktober 2008, di Hotel Equatorial, Kuala Lumpur, Malaysia).
- 8) Partai Polkitik, *Civic Literacy* dan *Civil Society*. Inovasi Pendidikan Politik Bagi Transformasi Demokratis di Indonesia, diseminarkan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI), 17-19 November 2008, di Denpasar Bali).

9. Penghargaan

- a. Dosen Teladan UPI, 2008.
- b. STV Award, 2008
- c. Satyalancana Karyasatya X Tahun (Kepres 025/TK/2008)
- d. Bintang Dwidyasistha (Skep Panglima TNI, 2008)

Bandung, 10 November 2010

Prof. Dr. Karim Suryadi. M.Si.
NIP. 19700814199402.1.001